

## Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Melalui Program Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo

Ariqotul Fadhillah <sup>1\*</sup>; Calvin Edo Wahyudi <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia; afadhilah38@gmail.com

\*Correspondence : afadhilah38@gmail.com

### ABSTRAK

Program Rumah Padat Karya dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan akhir untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya. Rumah Padat karya Dukuh Sutorejo bertempat di Kelurahan Dukuh Sutorejo. Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo memiliki 2 kelompok usaha yaitu rumah batik, dan budidaya ikan lele. Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo merupakan Kelurahan yang memiliki warga MBR terbanyak di Kecamatan Mulyorejo serta satu-satunya Rumah Padat Karya di Kecamatan Mulyorejo yang memiliki potensi batik lokal dengan corak khas yang unik. Penelitian ini bertujuan guna mendeskripsikan tahapan pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo telah dilakukan dengan hasil yang baik dan sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi, masih perlu adanya peningkatan program pembinaan dan pelatihan yang menyeluruh bagi tenaga kerja MBR. Selain itu, diperlukan upaya perlindungan lebih dalam untuk mempermudah tenaga kerja MBR memperoleh pemberdayaan dan perlindungan dari pemerintah.

### ABSTRACT

The *Rumah Padat Karya* program was created by the Surabaya City Government with the ultimate goal of reducing poverty and unemployment in the City of Surabaya. The Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo is located in the Dukuh Sutorejo Village. The Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo has 2 business groups, namely a batik house and catfish farming. The Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo is the Kelurahan that has the most MBR residents in the Mulyorejo Subdistrict and the only Rumah Padat Karya in the Mulyorejo Subdistrict that has the potential for local batik with a unique style. This study aims to describe the stages of empowering Low-Income Communities (MBR) through the *Rumah Padat Karya* Dukuh Sutorejo program. The research method uses a type of qualitative research with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the empowerment of Low-Income Communities (MBR) through the *Rumah Padat Karya Dukuh* Sutorejo program had been carried out with good results and was in accordance with existing theory. However, there is still a need for improvement in additional coaching and training programs for MBR workforce. In addition, deeper protection efforts are needed to make it easier for MBR workforce to obtain empowerment and protection from the governments.

### Kata kunci

*Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemberdayaan Masyarakat, Program Rumah Padat Karya*

### Keywords

*Low-Income Communities (MBR), Community empowerment, Rumah Padat Karya Program*

## Pendahuluan

Salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar adalah Indonesia. Pertambahan jumlah penduduk yang sangat besar di Indonesia akan berdampak pada ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kelebihan pasokan tenaga kerja dan kurangnya lapangan kerja yang tercipta di setiap industri yang menyebabkan pengangguran (Soleh, 2017). Selain masalah pengangguran, ada masalah lain akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu kemiskinan. Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multifaset, karena tidak hanya kemiskinan yang meningkat, tetapi ukuran ekonominya juga serius, munculnya ketidakstabilan politik dan masalah sosial domestik.

Maraknya kegiatan dan program pembangunan belum memungkinkan negara Indonesia untuk sepenuhnya makmur. Beberapa bidang pembangunan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan belum ditangani secara baik di masa lalu. Bahkan, pembangunan yang terus meningkat malah semakin memperburuk garis kemiskinan di Indonesia. Proses pembangunan nasional di Indonesia sangat terhambat oleh kemiskinan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis dan sinergis agar setiap orang dapat hidup bermartabat.

Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia tersebut juga dapat terjadi di beberapa kota besar salah satunya yaitu Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki warga yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). MBR adalah masyarakat kelas menengah bawah yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup (Lopulalan & Leuwol, 2019). MBR di Kota Surabaya memiliki akses terhadap bantuan pemerintah di sektor-sektor seperti pendidikan dan kesehatan, serta kesempatan untuk memasuki dunia kerja melalui pelatihan dan bursa kerja. Selain itu, warga MBR mendapat prioritas akses rumah susun, bantuan sembako untuk lansia, yatim piatu dan penyandang cacat, serta program rehabilitasi rutilahu (rumah tidak layak huni).

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya guna menurunkan kemiskinan tersebut ialah dengan memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah guna menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan memaksimalkan potensi kesejahteraan sosial perkotaan dari pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan yang sistematis, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial yang komprehensif, Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk membuat prosedur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terkoordinasi antara sumber kesejahteraan sosial perkotaan dan komponen potensi.

Pemerintah Kota Surabaya berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dan salah satu inisiatifnya adalah pelaksanaan program pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Program Rumah Padat Karya. Program Rumah Padat Karya tidak hanya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi MBR, tetapi juga dapat menciptakan peluang kerja. Hal ini dilakukan dengan memberikan fasilitas pelatihan untuk membekali mereka dengan alat-alat yang tepat untuk bidang yang mereka geluti. Rumah Padat Karya merupakan program yang digagas oleh Walikota Surabaya dan digunakan sebagai fasilitas bagi warga MBR di Kota Surabaya. Rumah Padat Karya dibangun di atas tanah atau aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Pemanfaatan tanah/aset kota untuk kegiatan padat karya diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Saat ini, terdata di Sistem Aplikasi Pemkot Surabaya mencatat 34 Rumah Padat Karya yang tersebar di 14 Kecamatan Surabaya ([bpkad.surabaya.go.id](http://bpkad.surabaya.go.id), 2023). Salah satunya adalah Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo yang berada di kawasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo.

Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo telah diresmikan oleh Walikota Surabaya pada Juni 2022. Terdapat 2 (dua) macam bidang usaha di Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo, yaitu produksi batik, dan budidaya ikan lele. Adanya Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo ini didasarkan pada Kelurahan Dukuh Sutorejo memiliki warga MBR tertinggi daripada kelurahan lain yang terdapat di wilayah Kecamatan Mulyorejo. Warga MBR tersebut perlu diberdayakan agar dapat mandiri dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelurahan Dukuh Sutorejo merupakan satu-satunya kelurahan di Kecamatan Mulyorejo yang memiliki potensi batik lokal dengan corak khas tersendiri sehingga memiliki peluang untuk dikembangkan dan dapat diperjual belikan. Oleh karena itu, Program Rumah Padat Karya mengedepankan pemberdayaan masyarakat dengan mendorong berkembangnya usaha, produk, dan lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan.

Pemberdayaan masyarakat melalui program rumah padat karya merupakan salah satu solusi yang dapat dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Para warga MBR memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi pelaku bisnis yang mandiri sehingga dapat mendukung ketahanan finansialnya di masa depan. Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui Program Rumah Padat Karya di Kelurahan Dukuh Sutorejo tidak hanya untuk membekali Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan bekal yang diperlukan untuk menjadi pengusaha, dan juga untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Studi yang sebelumnya juga membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya seperti studi Putricia & Prathama (2023) yang mengambil lokasi penelitian di Rumah Padat Karya Viaduct by Gubeng. Kemudian studi dari Dian & Ma'ruf (2019) bahwa pemberdayaan masyarakat desa Plandaan

melalui program Padat Karya Tunai berhasil dengan hasil yang cukup optimal dengan menitikberatkan pada tahapan pemberdayaan masyarakat yang mencakup persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif program, pemformulasian rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi. Penelitian lain dari Risa et al., (2021) menunjukkan bahwa implementasi program Padat Karya Tunai Dana Desa Karang Gading kurang optimal, sumber daya belum mencukupi, struktur birokrasi kurang tersistematis, serta hanya disposisi/sikap yang telah optimal. Sedangkan studi Budiasa (2019) menunjukkan bahwa kebijakan PKT lebih berhasil diterapkan di desa, yang ditunjukkan oleh faktor-faktor seperti penggunaan dana desa untuk kegiatan prioritas; pelaksanaan kegiatan PKT secara swakelola; pembayaran upah secara tunai; dan partisipasi masyarakat selaku pelaksana swakelola.

Berdasarkan studi-studi tersebut belum ada yang membahas dengan melakukan proses analisis menggunakan pendekatan dari Ginanjar Kartasasmita (2016) yang memiliki 3 indikator yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Hal inilah yang menjadi urgensi dilakukan studi ini untuk mendeskripsikan tahapan Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Melalui Program Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo.

## Metode

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong yang dikutip oleh (Raco, M.E., 2018) sumber data utama dalam penelitian adalah kata dan tindakan dengan tambahan yang berasal dari dokumen dan lain-lain. Oleh karena itu, datanya terbagi dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lainnya. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun wawancara dilakukan dengan Pengurus Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo, Aparatur Kelurahan Dukuh Sutorejo, dan Tenaga Kerja MBR. Data sekunder dikumpulkan dari media lainnya yang relevan dengan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo terletak di wilayah Kelurahan Dukuh Sutorejo yang beralamatkan di Jl. Labansari No. 1, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo berdiri pada tahun 2022 dan diresmikan oleh Walikota Surabaya pada 30 Juni 2022. Kelompok usaha yang tergabung di Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo adalah UMKM Batik Serasi Reborn dan budidaya ikan lele. Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo ini menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi para pegawai pemerintahan yang ingin mencari kain batik untuk dibuatkan seragam.

Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo berdiri di lahan aset seluas 387 m<sup>2</sup> dan memiliki luas bangunan kurang lebih 71 m<sup>2</sup>. Fasilitas yang terdapat di Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo adalah rumah batik yang meliputi ruangan untuk pameran hasil produksi batik, ruangan untuk produksi batik, dan lahan untuk budidaya lele yang mana disediakan 4 kolam terpal.

Gambar 1. Rumah Padat karya Dukuh Sutorejo



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023

Untuk mengetahui tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Ginanjar Kartasasmita dapat dilakukan dengan upaya 1) *enabling*; 2) *empowering*; dan 3) *protecting*.

### 1. *Enabling*

*Enabling* merupakan langkah pertama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Menciptakan iklim atau suasana dimana potensi/daya masyarakat dapat berkembang merupakan hal yang dapat dilakukan sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan dalam tahapan *enabling* dengan melalui upaya penyadaran dan pembentukan kelembagaan.

Sesuai dengan wawancara pada aparaturnya Kelurahan Dukuh Sutorejo, beliau mengatakan:

*"... Kelurahan ini kan punya potensi batik, satu-satunya kelurahan di Kecamatan Mulyorejo. Nah karena itu, kita mau ngembangin batik itu lagi biar jadi lapangan pekerjaan buat warga MBR. Dan pas banget kita udah punya kelompok usaha namanya "Serasi Reborn" dan aset tanah daripada nganggur kita ajukan ke Pemkot dan akhirnya disetujui. Karena kita sudah memenuhi syarat jadi disetujui dibangun Rumah Padat Karya ini, untuk kelengkapan dari dana kelurahan, pesertanya warga MBR. Kalau upaya penyadaran ini PR buat kita karena sikap warga MBR yang tidak mau diajak maju jadi upaya kita mengumpulkan mereka, memotivasi mereka, memberikan pelatihan-pelatihan sehingga mereka nanti bisa menghasilkan atau memperbaiki perekonomiannya dari hasil Rumah Padat Karya ini. Dari kita untuk mereka lah." (Hasil wawancara pada 6 Maret 2023).*

Upaya penyadaran akan potensi yang ada di Kelurahan Dukuh Sutorejo dilakukan melalui pembinaan. (Ramadhani, 2020) menyatakan bahwa dengan memberikan pengarahan, pengetahuan, dan alat yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup mereka, pembinaan memainkan

peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satunya pembinaan yang diberikan oleh Disnaker Kota Surabaya (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya). Akan tetapi, pembinaan dari dinas terkait tidak terlaksana dengan rutin. Upaya penyadaran ini membutuhkan keterlibatan peran pemerintah selaku pembuat kebijakan dan agen perubahan. Perilaku, sikap dan keterampilan para tenaga kerja MBR di Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo ini sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan yang telah dilakukan. Perilaku yang diperlihatkan oleh tenaga kerja MBR, baik itu ego masing-masing individunya masih tinggi. Sikap para tenaga kerja MBR yang sulit untuk diajak mengenal hal baru dan mencoba belajar membuat. Hal tersebut dikarenakan mereka menganggap bahwa membuat itu kegiatan yang ribet. Oleh karena itu, perlu adanya keselarasan antara partisipasi dan antusias dari keduanya, agar kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui tahapan *enabling* dapat berjalan secara optimal.

**Gambar 2. Upaya Penyadaran Bagi Tenaga Kerja MBR**



Sumber : Dokumentasi RPK Dusut, 2023

Upaya selanjutnya yaitu pembentukan kelembagaan kelompok. Kelembagaan mengedepankan asas kemandirian untuk para anggotanya. Oleh karena itu, kelembagaan dibentuk sebagai wadah untuk pemecahan masalah dan bertukar pikiran agar tujuan sebuah kelompok dapat tercapai. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari (Suharto, 2018) menyatakan bahwa pembentukan kelompok merupakan tahapan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pembentukan kelompok akan meningkatkan kerjasama dan solidaritas masyarakat, bahkan membawa inovasi dan ide-ide baru lebih cepat dan mudah mengelola keberhasilannya. Di dalam Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo ini terdapat kelembagaan kelompok. Kelembagaan tersebut yaitu adanya kelompok Serasi Reborn dan budidaya ikan lele. Kelompok di atas memiliki tujuan yaitu ingin mengoptimalkan potensi Kelurahan Dukuh Sutorejo yang sudah ada dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya suatu kesejahteraan. Administrasi di dalam Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo juga sudah optimal hal tersebut terlihat dari adanya data-data terkait hasil produksi batik meliputi

pemasukan dan pengeluaran, jenis kegiatan pemberdayaan yang sudah terlaksana, asal modal dan perkembangan sarana prasarana yang dimiliki, serta buku penunjang lainnya.

## 2. *Empowering*

*Empowering* merupakan tahapan dalam pemberdayaan masyarakat terkait dengan penguatan potensi yang dimiliki masyarakat. Upaya *empowering* yang dilakukan dengan tolak ukur keberhasilan adanya pelatihan, pemberian modal dan kelengkapan sarana prasarana, serta pemasaran hasil produksi.

Gambar 3. Pelatihan Membuat Kepala Tenaga Kerja MBR



Sumber : Dokumentasi RPK Dusut, 2023

Sesuai dengan hasil wawancara pada aparaturnya Kelurahan Dukuh Sutorejo, beliau mengatakan:

*"... Kemarin sempat ada pelatihan 2 hari dari Disnaker. Yang hari pertama itu dibarengi sama sosialisasi program Padat Karya. Pesertanya ibu-ibu warga MBR yang ingin belajar membuat. Bentuk pelatihannya itu cara membuat, terus pemasaran produk ke e-peken. Tapi kalau untuk lele belum ada pelatihan dari dinas. Lele yang di padat karya ini terbilang baru soalnya yang sebelum ini gagal panen karena kurang komunikasi sama dinas dan belum punya pengalaman akhirnya diganti sama orang yang baru. Sekarang masih belum ada hasil. Ada lele di rw yang berhasil itu dapat kita pelajari supaya lele yang di padat karya ini lebih maksimal." (Wawancara, 6 Maret 2023).*

Hal berbeda disampaikan oleh Kartina selaku tenaga kerja MBR di bagian lele yaitu, sebagai berikut:

*"... Kalau pelatihan dari dinas sampai sekarang belum ada. Dulu sempat gagal panen mbak banyak yang mati padahal masih kecil-kecil. Yang gagal itu karena orangnya belum ada pengalaman terus juga beliaunya tidak mau dikasih tau dan cari tau. Akhirnya dicoba lagi dan diganti sama saya dan suami. Tapi belum ada hasil mbak masih baru soalnya tapi Alhamdulillah lelenya udah lumayan besar seukuran telapak tangan. Lele gak ada pelatihan dari dinas mbak kita cuma lihat dari RW yang berhasil. Jadi kita belajarnya ya dari mereka soalnya mereka gak mau masuk padat karya. Jadi kalau misalnya saya belum tau merawatnya saya Tanya di RW terus mereka jelaskan" (Wawancara, 13 Maret 2023).*

Upaya pertama yang dilakukan adalah terkait program pelatihan. Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan membuat batik. Dengan mendapat pelatihan tersebut tenaga kerja MBR dapat mencoba teknik baru agar dapat meningkatkan hasil produksi batik. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari (Gebang & Purworejo, 2021) menyatakan bahwa komponen kunci dari pemberdayaan masyarakat adalah pelatihan. Pelatihan dapat membantu masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, pelatihan dapat menjadi metode pembelajaran yang cepat untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi pelatihan yang diberikan tidak menyeluruh. Pelatihan hanya diberikan kepada kelompok usaha batik Serasi Reborn, sedangkan untuk budidaya ikan lele belum mendapatkan pelatihan. Pelatihan juga tidak dilaksanakan secara rutin hanya dilakukan upaya monitoring sebulan sekali untuk kelompok usaha batik, dan seminggu sekali untuk budidaya ikan lele. Selain itu, tantangan terbesar adalah memahami sikap dan perilaku tenaga kerja MBR yang sulit diajak untuk maju dan berkembang, persamaan persepsi harus dilakukan secara bertahap dan menggandeng seluruh elemen yang ada guna mempengaruhi daya pikir tenaga kerja MBR tersebut agar mau bersama-sama melalui pengoptimalisasian potensi yang ada di Kelurahan Dukuh Sutorejo.

**Gambar 4. Pemberian Bantuan Modal Kepada RPK**



Sumber : Dokumentasi RPK Dusut, 2023

Sesuai dengan hasil wawancara pada aparaturnya Kelurahan Dukuh Sutorejo, beliau mengatakan:

*"... Sebenarnya kalau masalah modal mudah mbak, modal Padat Karya ini kan dari dana kelurahan, kalau memang tidak mencukupi kita carikan dari luar misalnya dari CSR atau bank punya Pemkot. biasanya warga MBR ini kalau tidak ada modal mereka malas bekerja. Karena mereka minta setiap bulan itu dapat gaji. Susahnya MBR itu karena mereka bukan pengangguran, tapi dia punya pekerjaan tapi belum layak. Jadi kalau mereka disuruh penuh beralih ke padat karya ini juga setengah hati. Itu kendalanya. Jadi kita beri motivasi, kita tuntun pelan-pelan, kita dukung dengan kelengkapan sarana prasarana, kita dukung dengan dana kelurahan biar mereka bisa mandiri bisa menghasilkan dan memberikan contoh kepada MBR yang lain. Intinya kita beri kemudahan terhadap fasilitas." (Wawancara, 6 Maret 2023).*

Upaya selanjutnya adalah pemberian modal dan kelengkapan sarana prasarana. Modal dan sarana prasarana merupakan komponen pemberdayaan masyarakat yang paling krusial. Akses pemberian modal dalam pemberdayaan

tenaga kerja MBR terbilang mudah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari (Nurami, 2013) menyatakan bahwa modal dapat menjadi sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan sektor informal. Dengan fasilitas yang memadai dan didukung oleh kemajuan teknologi modern, tenaga kerja MBR dapat membantu penyelesaian pekerjaan dengan lebih cepat. Oleh karena itu, pemberian modal dan kelengkapan sarana prasarana yang diberikan oleh Kelurahan Dukuh Sutorejo maupun oleh lembaga pemerintah melalui program Rumah Padat Karya dirasa sangat membantu para tenaga kerja MBR.

Gambar 5. Platform Penjualan Online RPK Dusut



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023

Sesuai dengan hasil wawancara pada aparat Kelurahan Dukuh Sutorejo, beliau mengatakan:

*"... Kalau untuk penjualan batik kita jual ke e-peken karena disana kan tempat belanja buat pegawai pemerintahan di Kota Surabaya. Selain e-peken kita juga jual di online mbak di instagram sama tiktok. Nah yang pegang akunnya itu Mbak Santi. Nama instagram dan tiktok namanya Mbak Santi. Kadang juga ada orang yang langsung datang ke gallery mau lihat langsung barangnya. Kata Mbak Santi, saya sama Pak Camat itu sales marketingnya padat karya jadi kalo kami yang jalan pesanan jadi banyak. Tapi penjualan kita seringnya offline tapi yang online juga ada. Kalau online itu ada yang agak keberatan soalnya ada biaya ongkir itu yang lumayan mahal. Tapi kalau offline juga ada biaya ongkir tapi gak semahal di online."* (Wawancara, 6 Maret 2023).

Upaya *empowering* selanjutnya yaitu pemasaran hasil produksi. Seiring perkembangan digital menjangkau akses pasar sangat mudah dilakukan. Hal tersebut memudahkan tenaga kerja MBR untuk menawarkan barang dagangannya ke berbagai wilayah dengan waktu yang singkat. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari (Nurami, 2013) menyatakan bahwa pemasaran dapat menjadi strategi untuk mendorong persaingan sektor pasar dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mendukung pemberdayaan masyarakat,

khususnya dengan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat miskin. Hasil produksi Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo dipasarkan secara *online* maupun *offline*. Penjualan *online* melalui *e-peken*, dan media sosial. Hasil produksi Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo adalah beragam jenis corak batik yang dijual dalam bentuk kain maupun pakaian. Untuk hasil budidaya ikan lele adalah akan dijual ke tengkulak ikan maupun dijual dalam bentuk olahan makanan. Kendala pemasaran adalah masyarakat enggan membeli secara *online* dikarenakan ada biaya tambahan untuk ongkos kirim, dan juga aplikasi *e-peken* sering mengalami gangguan.

### 3. *Protecting*

*Protecting* menjadi tahapan yang sangat perlu digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bentuk perlindungan dalam pemberdayaan masyarakat agar tidak ada kesenjangan antara yang lemah dengan yang kuat. Indikator perlindungan lainnya adalah terbentuknya suatu badan hukum yang secara tegas melindungi dan membela suatu kelompok yang bergerak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan hasil wawancara pada aparaturnya Kelurahan Dukuh Sutorejo, beliau mengatakan:

*"... Kalau untuk upaya perlindungan kita sudah ada kelompok kerja, kita buat SK Kelompok Usaha Bersama (KUB). Disini setiap kelompok MBR ada KUB nya. Serasi Reborn itu ada KUB nya lele juga ada. Upaya hukumnya hanya seperti itu. Gunanya KUB itu untuk legalitas kelompok usaha tersebut juga untuk memudahkan jika ada bantuan atau upaya pemberdayaan dari pemerintah. Kita juga permudah bagi warga MBR lain yang ingin bergabung ke padat karya Dusun ini. Terus kita juga beri perlindungan dalam hal pemasaran. Produk padat karya kan dijual di *e-peken* itu terbilang aman. Aman dilihat dari metode pembayaran yang digunakan karena di *e-peken* itu tidak ada bank perantara jadi meminimalisir adanya salah transfer. Jadi kalau misalnya ada kesalahan pemerintah yang langsung turun tangan karena sisitemnya itu ada verifikasi buat umkm yang mau gabung. *e-peken* itu sangat membantu umkm, dibantu dalam hal mempromosikan di lingkup ASN" (Wawancara, 6 Maret 2023).*

Hal serupa juga disampaikan oleh Santi selaku Ketua Pengurus Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo yaitu, sebagai berikut:

*"... Legalitas hukum di padat karya ada. Untuk legalitas usaha itu ada SK KUB pembuatannya dibantu kelurahan. Setiap kelompok usaha dibuatkan SK KUB. Serasi Reborn sama lele sudah ada KUB nya jadi sudah legal dan aman. Ada SK KUB ini juga mempermudah buat kita cari modal keluar terus kalau ada pelatihan atau kegiatan pemberdayaan kita juga dapat. Terus perlindungan yang lain itu juga di pemasaran. Saya itu merasa aman kalau produknya dijual di *e-peken* daripada di sosmed. Soalnya *e-peken* itu bayarnya lewat QRIS dan kalau sudah transaksi akan ada laporan keuangan nah itu buat bahan evaluasi terkait keuangan umkm. *e-peken* juga bisa tahu mana umkm yang sepi atau pasarnya kurang nah itu nantinya dapat pembinaan dari pemkot. Kalau upaya untuk memandirikan MBR itu saya usahakan setiap bulan menerima gaji dan Alhamdulillah itu sudah berhasil. Yang dapat gaji Cuma yang aktif-aktif aja itu ada 4 orang. Setiap orang per bulan bisa pegang Rp. 2.500.000 dari hasil penjualan batik." (Hasil wawancara pada 13 Maret 2023).*

Upaya perlindungan yang diberikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini melalui penerbitan SK KUB (Kelompok Usaha Bersama). Adanya SK KUB dirasa telah membantu dan memudahkan kelompok usaha dalam mendapatkan

perlindungan, bantuan dan kegiatan pemberdayaan dari pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari (Patma et al., 2021) menyatakan bahwa legalitas usaha dapat memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk pembuatan SK KUB dibantu dan difasilitasi oleh Kelurahan Dukuh Sutorejo untuk mendapatkannya. Sehingga kelompok usaha di dalam Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo sudah mendapat pengakuan yang sah di mata hukum negara dan terjamin legalitasnya.

Upaya perlindungan selanjutnya adalah memberikan perlindungan terhadap pemasaran hasil produksi melalui e-peken. e-peken memiliki beberapa fitur yang membuat UMKM yang tergabung dan pembeli merasa aman jika akan bertransaksi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari (Suraji, 2013) menyatakan bahwa perlindungan produsen dan konsumen dalam pemasaran dapat membantu dalam memperoleh barang dan jasa yang bermutu tinggi dan aman. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap barang atau jasa, yang kemudian akan membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu fitur aman yang dimiliki oleh e-peken adalah metode pembayaran yang digunakan melalui QRIS, tidak ada bank penengah antara penjual dan pembeli hal tersebut berguna untuk meminimalisir adanya salah transfer.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa tahapan pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Program Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo meliputi *enabling*, *empowering*, dan *protecting* dapat dikatakan baik dibuktikan dengan, 1) *Enabling* yang terkait dengan upaya penyadaran dan pembentukan kelembagaan kelompok telah dilakukan dengan baik, namun partisipasi dan antusias para tenaga kerja MBR di Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo yang menjadikan pemberdayaan kurang optimal dalam pelaksanaannya. 2) *Empowering* yang dilakukan dengan tolak ukur keberhasilan adanya pelatihan, pemberian modal dan kelengkapan sarana prasarana, serta pemasaran hasil produksi. Untuk pelatihan tidak menyeluruh hanya dilakukan kepada kelompok Batik Serasi Reborn. Terkait permodalan, Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo memiliki akses permodalan yang cukup mudah, serta kelengkapan sarana prasarana yang telah memadai. Pemasaran hasil produksi batik dilakukan secara online dan offline. 3) *Protecting* yang dilakukan dengan upaya adanya legalitas usaha dan memberikan perlindungan dalam pemasaran hasil produksi telah dilakukan dengan baik.

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu dalam upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran tenaga kerja MBR yang dapat dikatakan masih rendah, maka perlu adanya upaya pengawasan dan dorongan yang dilakukan oleh pemerintah secara

berkelanjutan terhadap tenaga kerja MBR tersebut. Sehingga, tujuan dilakukannya pemberdayaan masyarakat terhadap tenaga kerja MBR dapat lebih optimal dan dibentuknya kelembagaan kelompok dapat terlaksana dengan baik serta antusias anggota juga ikut meningkat.

## Referensi

- Budiasa, A. A. G. R., Raka, A. . G., & Mardika, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 71–82. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>
- Dian, T. R., & Ma'ruf, M. F. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). *Publika*, 7(4), 6. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Dr. J.R. Raco, M.E., M. S. (2018). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya. PT Grasindo. <https://osf.io/mfzuj/>
- Gebang, K., & Purworejo, K. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Olahan Kue Indonesia Guna Mengembangkan Wirausaha Di Desa. *Abdimas Akademika*, 2(02), 130–139. <https://aks-akk.e-journal.id/JAA/article/view/142/92>
- Kartasmita, G. (2016). Pemberdayaan masyarakat: Konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat. *Yogyakarta: UGM, Sp 607*, 1–25.
- Lopulalan, J. E., & Leuwol, N. V. (2019). Perumahan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Sorong. *Jurnal Akrab Juara*, 4(4), 111–128.
- Nurami, M. (2013). Peran Modal Sosial pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Usaha Daur Ulang di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1(2), 1–15. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/327>
- Patma, T. S., Muslim, S., & Kecil, U. (2021). *Pemberdayaan umkm melalui legalitas usaha. September*, 246–249.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Putricia, A. M., & Prathama, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Padat Karya Viaduct by Gubeng di Kota Surabaya. *NeoRepublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 95-110.
- Ramadhani, M. (2020). Pembinaan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. *EPrints UNISKA Respository Universitas Islam Kalimantan*, 1–23. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3564>

- Risa, H., Badaruddin, B., & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *Perspektif*, 10(2), 739–753. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207>
- Soleh, A. (2017). Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(2), 93–92. <https://doi.org/10.32884/ideas.v5i1.173>
- Suharto. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi UU Desa (Analisis Implementasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa). *Senas POLHI*, 1, 19.
- Suraji, & Pranoto. (2013). Pemberdayaan dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Rangka Melindungi Kepentingan Konsumen Kurang Mampu. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3), 5–14. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10144>